

**SKRIPSI**

**PERANAN KEPOLISAN DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

**(Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa  
Tahun 2014 – 2016)**



**OLEH :**

**MULIADI IRWAN**

**B 111 13 331**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

**HALAMAN JUDUL**

**PERANAN KEPOLISAN DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

**(Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa  
Tahun 2014 – 2016)**

**Oleh :**

**MULIADI IRWAN**

**B111 13 331**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian

Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
(Studi Kasus Di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa  
Tahun 2014 – 2016)**

**Disusun dan Diajukan oleh:**

**MULIADI IRWAN**

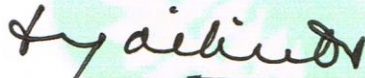
**B111 13 331**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 8 Agustus 2017  
Dan Dinyatakan Lulus

### **Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**



**Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.**  
**NIP. 19531124 197912 1 001**



**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**  
**NIP. 19661212 199103 2 002**

**A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan**



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610607 198601 1 003**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Muliadi Irwan

Nomor Pokok : B111 13 331

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana  
Perjudian (Studi Kasus Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten  
Gowa Tahun 2014 - 2016).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juli 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.  
NIP. 19531124 197912 1 001



Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 19661212 199103 2 002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Merangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MULIADI IRWAN
Nomor Pokok	: B11113331
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian ( Studi Kasus Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014-2016)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2017

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,  
  
Prof. Dr. Ahmad Miru, SH., MH  
NIP. 19610607 198601 1 003

## ABSTRAK

**MULIADI IRWAN (B111 13 331) “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014-2016)”**. Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan dan arahan Bapak M. Syukri Akub selaku pembimbing I dan Ibu Haeranah selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Bajeng dan juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Bajeng.

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Bajeng Kabupaten Gowa dengan mengambil data dan mewawancarai pihak kepolisian khususnya pada Unit Reskrim yang menangani tindak pidana umum termasuk tindak pidana perjudian yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa bentuk peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dilihat dari upaya yang dilakukan antara lain upaya pre-emptif berupa penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ke masjid-masjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) *door to door*, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Kemudian upaya preventif berupa patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Dalam upaya represif pihak kepolisian secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana. Adapun hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya *pebackingan* dari oknum-oknum tertentu dan pelaku melarikan diri.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta ridho-Nya, sehingga Penulis senantiasa diberi kesehatan, kesabaran, keikhlasan, petunjuk, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014-2016).

Skripsi ini dibuat Penulis sebagai bentuk sumbangan akhir dijenjang pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tentu saja berasal dari apa yang pernah Penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa. Serta dari hasil penelitian dan diskusi Penulis dengan beberapa narasumber yang terkait dengan skripsi ini serta dari arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing.

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah mendukung, memberi semangat, dan mendampingi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada kedua orang tua Penulis, Ayahanda Irwan Said dan Ibunda ST. Kasriyani yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, cinta dan kasih sayang serta doa yang senantiasa beliau panjatkan demi keberhasilan dan

kesuksesan penulis meraih cita-cita. Dan juga kepada adik-adik Penulis, Muflih Irwan dan Muhlis Irwan yang selalu memberikan motivasi tersendiri kepada kehidupan Penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. M Syukri Akub, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan Penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan berkah dan hidayah kepada beliau. Ucapan terima kasih juga Penulis khaturkan atas bimbingan, saran, dan kritik yang bersifat membangun dari tim penguji skripsi ini yakni Bapak Prof. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku penguji I, Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku penguji II dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penguji III sekaligus sebagai dosen Pembimbing Akademik (PA) Penulis selama menempuh pendidikan Strata satu (S1).

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak kesulitan dan hambatan, akan tetapi semuanya dapat penulis lalui berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Puhubulu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya;



2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak/Ibu Dosen pada Departemen Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Hukum Acara dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum yang namanya tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu dan nilai-nilai yang Bapak/Ibu berikan kepada penulis;
4. Seluruh Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dan memberi kemudahan dalam setiap pengurusan administrasi penulis selama menempuh pendidikan Strata Satu (S1);
5. Bapak AKP Amin Juraid selaku Kapolsek Bajeng beserta jajarannya terkhusus Bapak Aiptu Kamaruddin, SH, selaku Kanit Reskrim Polsek Bajeng atas bimbingan dan kesediannya diwawancarai oleh Penulis;
6. Bapak AKBP Ivan Setiadi selaku Kapolres Gowa beserta Jajarannya, terkhusus kepada Bapak IPDA P. Malelak, S.H., M.H. selaku Kanit

Resmob Polres Gowa dan Bapak BRIPKA Yusran Jasfur atas bimbingan dan arahnya kepada Penulis;

7. Bapak Susanto, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Gowa beserta jajarannya, terkhusus kepada Bapak Muh. Syukur, S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gowa;
8. Bapak Muhammad Damis, S.H, M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, Gowa beserta jajarannya, terkhusus Bapak Abd. Latif, S.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, Gowa;
9. Keluarga Besar UKM ALSA LC Unhas, terkhusus angkatan 19 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas loyalitas dan persaudaraan teman-teman selama kita berALSA, karena Alsa Always Be One;
10. Keluarga Besar Hipma Gowa Komisariat Unhas, kak Rahmat, kak Baim, kak Wandu, kak Fajar, kak Anca, kak Cita, kak Arif, kak Ziza, kak Yuri, kak Lili, kak Epong, Kiki, Cammi, Ilo, Alam, Dayat, Raden dan adik-adik terima kasih atas keakraban dan persaudaraan kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik selama berhimpunan;
11. Keluarga Besarku, Kakek, Nenek, Paman, Tante, dan Sepupu-sepupuku yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan materi maupun nonmateri kepada penulis;

12. Sahabat-Sahabatku, Kakak dan Adik, Faisal Idris, Fajrin Basir, NurFitriana (Nhana), Nuryana (Ana), dan Raehanah (Hana), terima kasih telah menjadi bagian dari hidup Penulis;
13. Keluarga Besar IKA Smaba, alumni 2013 Globe, terkhusus keluarga besar IPA 3 “EXTHREME”, Alam, Fadly Zhahir, Aksan, Dadang, Fadly Hamka, Hendro, Ikhsan, Iccang, Mimi, Evhy, Mhena, Cocang, Imthy, Abhy, Ayu, Fika, Intan, Rihlah, Indah, Basrah, Anggi, Niar, Rini, Fitri, Nanna, Shira, Reski, Cikka, Inhu, Hana, Ira, Mutha, dan Alm. Wanda terima kasih atas persaudaraan dan kekeluargaan yang teman-teman berikan kepada Penulis;
14. Sahabat-sahabatku L-COM, Dinul Haq Qayyim Daud SH, Fathurrahman Marzuki, Adityawarman, Hirwan Ardiansyah SH dan Masyita Amani, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang selalu diberikan kepada Penulis semoga Persahabatan dan kebersamaan kita dapat terjalin sampai akhir nanti;
15. Keluarga Besar “TAMPAN?”, Dirwan, Alif, Ansyar SH, Akbar SH, Zaki, Taufik SH, Fikri, Firman, Eko, Fadel, Gusti, Farhan, Cikal, Azharul SH, dan Febri SH, terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan bantuan teman-teman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Saudara Rahmat Dermawan dan Muhammad Guntur HS, SH. Yang senantiasa mendampingi Penulis dan menjadi Guru dalam penyelesaian skripsi ini;

17. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kakak-kakak Legitimasi 2010, Mediasi 2011, Petitum 2012, adik-adik Diplomasi 2014 dan Juris 2015, Terkhusus teman-teman ASAS 2013 semoga tetap kompak kedepannya;
18. Teman-teman KKN Unhas Gelombang 93 Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, khususnya Posko Kelurahan Assorajang, Awal, Yesaya, Devi, Dina, Wulan dan Inna. Bapak Bustan, STP, S.IP dan Ibu Rusdianah, S.IP selaku Lurah dan Sekretaris Kelurahan Assorajang beserta seluruh jajarannya, serta Bapak Randi dan Ibu Nia terima kasih telah menjadi orang tua penulis selama berKKN;
19. Beserta pihak-pihak lain yang tidak dituliskan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu akhirnya hanya kepada Allah SWT, kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT, meridhoi sebagai ibadah disisi-Nya, Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juli 2017

Penulis

**Muliadi Irwan**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana .....	8
1. Pengertian Tindak Pidana .....	8
2. Unsur - unsur Tindak Pidana .....	11
3. Jenis - jenis Tindak Pidana .....	15
B. Perjudian .....	18
1. Pengertian Perjudian .....	18

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian .....	21
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perjudian .....	32
4. Tipe-tipe Penjudi .....	35
C. Polisi dan Kepolisian .....	40
1. Istilah Polisi dan Kepolisian .....	40
2. Landasan Yuridis Kepolisian NRI .....	44
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian NRI .....	47
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana .....	53
1. Upaya Pre-Emptif .....	53
2. Upaya Preventif .....	54
3. Upaya Represif .....	54

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian .....	55
B. Teknik Pengumpulan Data .....	55
C. Jenis Dan Sumber Data .....	56
D. Teknik Analisis Data .....	57

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ...	58
B. Penyebab Maraknya Tindak Pidana Perjudian .....	59
C. Upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian .....	61

D. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian .....	80
E. Kasus dan Analisis Kasus .....	84

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

A. Tabel 1. Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Perjudian Tahun 2014 - 2016 di Polsek Bajeng .....	72
B. Tabel 2. Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Perjudian di Polres Gowa .....	75
C. Tabel 3. Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Perjudian di Kejaksaan Negeri Gowa .....	76
D. Tabel 4. Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Sungguminasa .....	77
E. Tabel 5. Data Perkara Perjudian yang dilimpahkan oleh Polsek Bajeng ke Pengadilan Negeri Sungguminasa .....	78



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup> sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.

Dalam Negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara *universal*. Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa ada dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku *Bushmen* di Afrika Selatan, suku *Aborigin* di Australia dan suku *Indian* di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu<sup>2</sup>. Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

---

<sup>2</sup> Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 181.

Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Secara umum perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Perjudian (*gambling*) dalam kamus *Webster* didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Dan resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. sementara itu, menurut Robert Carson dan James Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Pscyhology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai perbuatan dengan memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan

memperoleh suatu hasil dan keuntungan yang besar<sup>3</sup>. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai yang tinggi dalam suatu komunitas.

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.<sup>4</sup>

Praktik perjudian atau peruntungan nasib tersebut dewasa ini semakin merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat ekonomi bawah sampai dengan masyarakat ekonomi ke atas menggandrungi judi. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, mulai dari yang tradisional seperti perjudian dadu,

---

<sup>3</sup> <https://oursite116e11.wordpress.com/pengertian-gambling-online-gambling-serta-sejarahinya/> diakses 23 Februari 2017 Pukul 23.00 Wita.

<sup>4</sup> Anton Tabah, *Op.cit.*, hlm. 182.

sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (togel), sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi menggunakan telepon genggam atau biasa dikenal dengan istilah judi *online*. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti piala dunia (*world cup*), liga indonesia, bahkan liga antar kampung (tarkam), tidak luput dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.

Praktik perjudian tersebut perlu ditanggulangi karena di dalam KUHP bab XVI, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, Polisi sebagai aparaturnegara dan penegak hukum, berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mendorong rasa ingin tahu Penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian dalam hal ini peranan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sehingga penulis mengangkat judul **“Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Wilayah Polsek Bajeng Tahun 2014-2016)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Bajeng ?
2. Apa saja Kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Bajeng ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Bajeng;

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Bajeng.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberi manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana;
2. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pihak dalam hal ini kalangan akademisi, kalangan penegak hukum dan masyarakat umum dalam meminimalisir dan menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
3. Sebagai suatu karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan diharapkan kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah "*Stratbaar Feit*". Istilah *stratbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut J.E Jonkers<sup>5</sup> yang merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut :

"Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan".

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.



Kemudian menurut Simons<sup>6</sup> yang merumuskan pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut :

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi<sup>7</sup> memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut :

“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)”.

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum luar terkhusus belanda, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja misalnya mengartikan tindak pidana sebagai :

“Suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”.<sup>8</sup>

Hal serupa dikemukakan Indriyanto Seno Adji yang mengartikan tindak pidana sebagai :

---

<sup>6</sup> Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 105.

<sup>7</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 98.

<sup>8</sup> Komariah E. Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia-Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, hlm. 22.

“Perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”.<sup>9</sup>

Sementara menurut Moeljatno<sup>10</sup> dalam bukunya bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu “*Asas legalitas*” (*Principle of Legality*). Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan *Adagium* yaitu *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya.

---

<sup>9</sup> Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hlm. 155.

<sup>10</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

*Adagium Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*, berasal dari von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775 - 1833). Menurut von Feurbach<sup>11</sup>, asas legalitas mengandung tiga unsur, yaitu :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

### **a. Unsur Subjektif**

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya<sup>12</sup>. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut<sup>13</sup> :

1. Kesengajaan atau kelalaian;

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.

<sup>13</sup> Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan<sup>14</sup>. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut<sup>15</sup> :

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar :

---

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 193.

<sup>15</sup> Evi Hartanti, *Op.cit.*, hlm. 5.

Simons<sup>16</sup> secara sederhana menjabarkan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana ;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

Loebby loqman<sup>17</sup>, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
  - a. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
  - b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
  - c. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>16</sup> Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, hlm. 39.

<sup>17</sup> Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 99.

R. Tresna<sup>18</sup>, memberikan pandangannya mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Satochid Kartanegara<sup>19</sup> menjelaskan bahwa:

“Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan”.

Sedangkan menurut Moeljatno<sup>20</sup> untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP);

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 80.

<sup>19</sup> Ledeng Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

<sup>20</sup> Tongat, *Op cit.*, hlm. 105.

- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif).

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan dari segi unsur-unsur, maka kali ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana.

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.<sup>21</sup>

- a. Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

- b. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Misalnya : pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.<sup>22</sup>

a. Tindak pidana formil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya: pencurian, dan sebagainya.

b. Tindak pidana materil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya : pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*).<sup>23</sup>

a. Tindak pidana kesengajaan/ delik *dolus*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya : tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, dll.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 121.



b. Tindak pidana kealpaan/ delik *culpa*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, dan sebagainya.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omissionis*, dan delik *comissionis per omissionis comissa*.<sup>24</sup>

a. Delik *comissionis*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya: melakukan penipuan, pembunuhan, perjudian, dan sebagainya.

b. Delik *omissionis*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 552 KUHP.

c. Delik *comissionis per omissionis comissa*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

susu (pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP).

Selain yang telah diuraikan diatas, dalam berbagai literatur hukum pidana lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana lainnya.

## **B. Perjudian**

### **1. Pengertian Perjudian**

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “judi” adalah <sup>25</sup>:

“Permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu)”.

Sedangkan yang dimaksud dengan “berjudi” adalah<sup>26</sup> :

1. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.
2. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail definisi dari perjudian.

---

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 479.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) berbunyi :

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”<sup>27</sup>

Dari rumusan diatas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu<sup>28</sup>:

1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu;
2. Permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau kemenangan sedikit banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya. Misalnya permainan melempar bola, permainan memanah, bermain *bridge* atau domino.

Dua pengertian perjudian diatas, diperluas juga pada dua macam pertarungan, yaitu<sup>29</sup>:

---

<sup>27</sup> Pasal 303 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

<sup>28</sup> Adami Charzawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 166.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

1. Segala bentuk taruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain.
2. Segala bentuk taruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk taruhan secara limitatif, maka segala bentuk taruhan dengan cara bagaimana pun dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga perjudian dalam Pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Pada dasarnya perjudian adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pihak yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pihak pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan atau permainan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang

perjudian, dan memandang sebagai akibat dari konsekuensi masing-masing, serta tidak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian**

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimana perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Oleh karena itu perjudian merupakan tindak pidana, maka praktiknya dalam masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.

### **a. Pasal 303 KUHP**

Dalam Pasal 303 KUHP disebutkan :

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:

1e. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

2e. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk

itu, dengan tidak mempedulikan apakah untuk menggunakan kesempatan itu dengan adanya suatu syarat atau perjanjian atau dengan suatu cara apapun;

3e. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

(2) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.

(3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebisaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lainnya.

Yang menjadi objek dari ketentuan tersebut adalah permainan judi (*hazardspel*). Namun, KUHP tidak memuat tentang bentuk-bentuk permainan judi secara rinci. Menurut R.Soesilo<sup>30</sup>, tidak semua permainan dapat dikategorikan sebagai permainan judi, tetapi hanya permainan-permainan yang mempertaruhkan segala sesuatu yang bernilai dan

---

<sup>30</sup> R Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 222.

kemenangannya atau keuntungannya didasarkan pada kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan, seperti dalam permainan dadu, selikuran, *roulette*, bakarat, kocok, tombola, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan bola, dan sebagainya.

Dalam rumusan Pasal 303 tersebut, ada 5 (lima) macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*) yang dimuat dalam ayat (1)<sup>31</sup>:

1. butir 1e ada dua macam kejahatan;
2. butir 2e ada dua macam kejahatan; dan
3. butir 3e ada satu macam kejahatan.

*Kejahatan Pertama* dimuat dalam butir 1e yaitu: kejahatan yang “melarang orang yang tidak berhak (tanpa izin) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian jenis kejahatan ini terdiri dari unsur-unsur yaitu :

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya:
  1. menawarkan kesempatan;
  2. memberikan kesempatan.
- b. Objek: untuk bermain judi tanpa izin

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 158.

c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian.

Unsur Subjektif :

d. Dengan sengaja

Dalam kejahatan pertama ini, si pelaku tidak bermain judi. Disini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah (1) menawarkan kesempatan bermain judi, dan (2) memberikan kesempatan bermain judi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ketentuan ini ditujukan bagi para bandar judi. Sementara itu, orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 303 bis yang akan dibahas kemudian.

Dalam kejahatan pertama terdapat pula unsur kesengajaan. Artinya si pelaku memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Si pelaku sadar bahwa yang ditawarkan atau yang diberi kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi, dan disadarinya bahwa perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, artinya ia sadar bahwa dari perbuatannya itu ia mendapatkan uang untuk biaya kehidupannya.



*Kejahatan kedua* yang dimuat dalam butir 1e adalah “melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”. Dengan demikian unsur-unsurnya yaitu:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta;
- b. Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur Subjektif:

- c. Dengan sengaja

Pada kejahatan kedua ini, perbuatannya adalah turut serta (*deelnemen*). Artinya ia ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada kejahatan pertama. Apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pengertian turut serta menurut Pasal 303 ini adalah lebih luas dari pada sekedar turut serta pada bentuk orang yang turut melakukan (*medepleger*). Pengertian dari perbuatan turut serta atau penyertaan (*deelnemen*) disini adalah selain orang yang melakukan perbuatan seperti orang yang turut serta (*medepleger*) menurut Pasal 55 KUHP, juga termasuk orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*) dalam Pasal 56 KUHP, tetapi tidak termasuk orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*), karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat

secara fisik dengan orang yang melakukan perbuatan yang terlarang itu.<sup>32</sup>

Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan pada bentuk pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapat uang atau penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain judi, yang dari kegiatan itu dia mendapatkan uang atau penghasilan.

Seperti juga pada kejahatan pertama, pada kejahatan kedua ini terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini harus ditujukan pada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan atau usaha permainan judi. Artinya si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keturutsertaannya itu adalah dalam kegiatan permainan judi.

*Kejahatan ketiga* ialah “melarang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur:

Unsur-unsur Objektif:

a. Perbuatan: (1) menawarkan, (2) memberi kesempatan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

b. Objek: kepada khalayak umum

c. Untuk bermain judi tanpa izin

Unsur Subjektif:

d. Dengan sengaja

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan bentuk pertama. Persamaanya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan perbedaanya adalah sebagai berikut<sup>33</sup>:

1. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang. Sedangkan kepada khalayak umum, tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja.
2. Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

*Kejahatan keempat* dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah “larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin”. Dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta;
- b. Objeknya : dalam usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur Subjektif

- c. Dengan sengaja

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaannya adalah terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua unsur turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian. Kegiatan usaha perjudian disini adalah kegiatan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak.<sup>34</sup>

*Kejahatan kelima* mengenai perjudian ialah “melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi yang dijadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian unsur-unsurnya sebagai berikut<sup>35</sup>:

- a. Perbuatannya: turut serta
- b. Objek: dalam permainan judi tanpa izin
- c. Sebagai mata pencaharian.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>35</sup> *Ibid.*

Dalam bentuk kelima ini juga terdapat unsur turut serta, namun turut serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

b. Pasal 303 bis KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah;

Ke-1 Barangsiapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 303, untuk bermain judi;

Ke-2 Barangsiapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau di suatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang.

(2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah.

Dalam pasal ini, terdapat 2 (dua) jenis kejahatan tentang perjudian, yaitu : (1) melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, dan (2)

melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, di pinggir jalan, atau di tempat lain yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa untuk mengadakan perjudian itu<sup>36</sup>.

#### 1. Bentuk Pertama

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut<sup>37</sup>:

- a. Perbuatan: bermain judi
- b. Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP.

Kejahatan dalam Pasal 303 bis ini tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya Pasal 303 KUHP. Tanpa terjadinya pelanggaran Pasal 303 KUHP, maka pelanggaran Pasal 303 bis KUHP juga tidak ada.

#### 2. Bentuk Kedua

Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai berikut<sup>38</sup>:

- a. Perbuatan : ikut serta bermain judi;
- b. Tempatnya : jalan umum, pinggir jalan, tempat yang dapat dikunjungi umum;
- c. Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 169.

<sup>38</sup> *Ibid.*

Dalam kejahatan pertama tidak disebutkan adanya unsur tanpa mendapat izin/ tidak berhak, karena menurut Pasal 303 perbuatan memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin, sudah barang tentu orang yang menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303 dengan sendirinya adalah tanpa izin. Lain halnya dengan kejahatan bentuk kedua menurut Pasal 303 bis ini, harus disebutkan tanpa izin, walaupun rumusannya dalam kalimat lain yaitu “kecuali kalau ada izin”. Sebab jika tidak ditambahkan unsur demikian, setiap bentuk permainan judi akan dijatuhi dengan pidana, dan hal ini tidak sesuai dengan konsep perjudian menurut KUHP, dimana permainan judi hanya dilarang apabila dilakukan tanpa izin, yang merupakan sifat melawan hukum.

Dari ketentuan Pasal 303 bis ini dapat dilihat adanya kelonggaran yang diberikan dalam hal tempat untuk bermain judi itu sendiri, dimana pelaksanaan kegiatan perjudian ialah harus telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan di suatu rumah yang tidak dapat dilihat dari jalan umum<sup>39</sup>. Sama halnya dengan izin yang ada dalam Pasal 303 KUHP, izin tersebut diberikan agar perjudian dapat dikoordinasi dengan baik sehingga tidak

---

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 130.

meresahkan masyarakat dan ketertiban masyarakat pun dapat tetap terpelihara dan terjaga.

Kemudian dalam ayat (2) ada diatur mengenai residivis perjudian, dimana bagi mereka yang menjadi residivis dalam perjudian dihukum dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun atau pidana denda maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dulu, orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP dihukum dengan Pasal 542 KUHP. Namun, dengan ditetapkannya perjudian sebagai kejahatan, maka Pasal 542 KUHP tersebut dihapuskan dan diganti menjadi Pasal 303 bis menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian**

Secara garis besar perjudian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana yang apabila pelaksanaannya telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang seperti :
  - a. Casino dan petak Sembilan di Jakarta;
  - b. Undian berhadiah yang sudah berubah menjadi undian sosial berhadiah.



Jenis perjudian diatas bukanlah merupakan kejahatan karena perbuatan tersebut telah hilang sifat melawan hukumnya dengan adanya izin berupa legitimasi perjudian dari pemerintah. Hal ini berlandaskan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan Pasal 2 UU tersebut menyebutkan :

Undian yang diadakan itu ialah oleh :

- a) Negara;
- b) Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum atau oleh suatu perkumpulan yang telah berdiri sedikit satu tahun, di dalam lingkungan yang terbatas pada anggota untuk keperluan sosial,<sup>40</sup>

Sementara itu dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No.9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam (3) tiga jenis, yaitu <sup>41</sup>:

- a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :
  - 1) Roulette;
  - 2) Black Jack;
  - 3) Baccarat;
  - 4) Creps;
  - 5) Keno;
  - 6) Tombola;
  - 7) Super Ping-Pong;
  - 8) Lotto Fair;

---

<sup>40</sup> Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954 Tentang Undian

<sup>41</sup> Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

- 9) Satan;
- 10) Paykyu;
- 11) Slot Machine;
- 12) Ji Si Kie;
- 13) Big Six Wheel;
- 14) Chuca Luck;
- 15) Lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar;
- 16) Pachinko;
- 17) Poker;
- 18) Twenty One;
- 19) HwaHwe;
- 20) Kiu-kiu

b. Perjudian di Tempat Keramaian

- 1) Lempar Gelang;
- 2) lempar Uang;
- 3) Kim;
- 4) Pancingan;
- 5) Menembak sasaran yang tidak berputar;
- 6) Lempar bola;
- 7) Adu ayam;
- 8) Adu sapi;
- 9) Adu kerbau;
- 10) Adu kambing;
- 11) Pacuan kuda;
- 12) Pacuan anjing;
- 13) Mayong;
- 14) Erek-erek.

c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan;

- 1) Adu ayam;
- 2) Adu sapi;
- 3) Adu kerbau;
- 4) Pacu kuda;
- 5) Karapan sapi;
- 6) Adu domba/kambing.

Perjudian dalam bentuk ketiga ini tidak termasuk ke dalam pengertian penjelasan sebagaimana disebutkan diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

#### **4. Tipe-Tipe Penjudi**

Pada dasarnya ada tiga tingkatan penjudi atau tipe penjudi, yaitu<sup>42</sup> :

##### **1. *Social Gambler***

Penjudi tingkat pertama adalah para penjudi yang masuk dalam kategori “normal” atau seringkali disebut *social gambler*, yaitu penjudi yang sekali-sekali pernah ikut membeli lottery (kupon undian), bertaruh dalam pacuan kuda, bertaruh dalam pertandingan bola, permainan kartu, atau yang lainnya. Penjudi tipe ini pada umumnya tidak memiliki efek yang negatif terhadap diri maupun komunitasnya, karena mereka pada umumnya masih dapat mengontrol dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya. Perjudian bagi mereka dianggap sebagai pengisi waktu atau hiburan semata dan tidak mempertaruhkan sebagian besar besar pendapatan mereka ke dalam perjudian. Keterlibatan mereka dalam perjudian pun seringkali karena ingin bersosialisasi dengan teman atau keluarga.

---

<sup>42</sup> Johanes Papu, *Perilaku Berjudi*, <http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial.asp>, diakses pada 26 Februari 2017 Pukul 22.15 Wita.

## 2. *Problem Gambler*

Penjudi tingkat kedua disebut sebagai penjudi “bermasalah” atau *problem gambler*, yaitu perilaku berjudi yang dapat menyebabkan terganggunya kehidupan pribadi, keluarga maupun karir. Meskipun belum ada indikasi bahwa mereka mengalami suatu gangguan kejiwaan (*National Council on Problem Gambling USA, 1997*). Para penjudi jenis ini seringkali melakukan perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah kehidupan. Penjudi jenis ini sebenarnya sangat berpotensi masuk ke dalam tingkatan penjudi paling tinggi yang disebut *pathologis* jika tidak segera disadari dan diambil tindakan terhadap masalah-masalah yang sebenarnya sedang dihadapi.

## 3. *Pathological Gambler*

Penjudi tingkat ketiga disebut sebagai penjudi “pathologis” atau *pathological gambler* atau *compulsive gambler*. Ciri-ciri penjudi tipe ini adalah ketidakmampuannya melepaskan diri dari dorongan-dorongan untuk berjudi. Mereka sangat terobsesi untuk berjudi dan secara terus-menerus terjadi peningkatan frekuensi berjudi dan jumlah taruhan tanpa dapat mempertimbangkan akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, baik terhadap

dirinya sendiri, keluarga, karir, hubungan sosial, dan lingkungan sekitarnya.<sup>43</sup>

Meskipun pola perilaku berjudi ini tidak melibatkan ketergantungan terhadap zat kimia tertentu, namun menurut para ahli, perilaku berjudi yang sudah masuk dalam tingkatan ketiga dapat digolongkan sebagai suatu perilaku bersifat adiksi (*addictive disorder*). Individu yang didiagnosa mengalami gangguan perilaku jenis ini seringkali diidentifikasi sebagai orang yang bersifat kompetitif, sangat memerlukan persetujuan atau pendapat orang lain dan rentan terhadap bentuk perilaku adiksi yang lain. Individu yang sudah termasuk dalam kategori ini seringkali diiringi dengan masalah-masalah kesehatan dan emosional. Masalah-masalah tersebut misalnya kecanduan obat, alkoholik, penyakit saluran pencernaan dan pernafasan, depresi atau masalah yang berhubungan dengan fungsi seksual.<sup>44</sup>

Adapun kriteria individu yang dapat digolongkan sebagai penjudi yang patologis menurut *DSM-IV Screen* (alat yang digunakan untuk mengukur tingkatan penjudi) adalah jika individu tersebut menunjukkan 5 (lima) faktor atau lebih dari faktor-faktor sebagai berikut<sup>45</sup> :

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

a. *Preoccupation*

Terobsesi dengan perjudian (contoh, sangat terobsesi untuk mengulangi pengalaman berjudi yang pernah dirasakan dimasa lalu, sulit mengalihkan perhatian pada hal-hal lain selain perjudian, atau secara khusus memikirkan cara-cara untuk memperoleh uang melalui perjudian).

b. *Tolerance*

Kebutuhan untuk berjudi dengan kecenderungan meningkatkan jumlah uang (taruhan) demi mencapai suatu kenikmatan atau kepuasan yang diinginkan.

c. *Withdrawal*

Menjadi mudah gelisah dan mudah tersinggung setiap kali mencoba untuk berjudi.

d. *Escape*

Menjadikan perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah hidup atau perasaan yang kurang menyenangkan (contoh perasaan bersalah, ketidakberdayaan, cemas, depresi, atau sedih).

e. *Chasing*

Setelah kalah berjudi, cenderung kembali berjudi lagi untuk mengejar kemenangan supaya memperoleh titik impas.

f. *Lying*

Berbohong kepada anggota keluarga, konselor atau orang lain tentang keterlibatan dirinya dalam perjudian.

g. *Loss of Control*

Selalu gagal dalam usaha mengendalikan, mengurangi, atau menghentikan perilaku berjudi.

h. *Risked Significant Relationship*

Membahayakan atau menyebabkan rusaknya hubungan persahabatan dengan orang-orang yang sangat berperan dalam kehidupan, hilangnya pekerjaan, putus sekolah, atau keluarga berantakan, atau kesempatan berkarir menjadi hilang.

i. *Bailout*

Mengandalkan orang lain untuk memberikan uang kepada dirinya ataupun keluarganya dalam rangka mengurangi beban finansial akibat perjudian yang dilakukan.

Kondisi dewasa ini memperbanyak pilihan dalam permainan perjudian karena permainan yang dibawa oleh para pendatang yang sebenarnya hanya merupakan tambahan dari jenis yang sudah dikenal oleh komunitas masyarakat setempat. Dengan berbagai jenis permainan judi dan kemudahan teknik permainannya maka perjudian dengan mudah dan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia.

## C. Polisi Dan Kepolisian

### 1. Istilah Polisi dan Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite*, di Jepang dengan istilah *koban* dan *chuzaisho* walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *politeia*. Kata *politeia* digunakan sebagai title buku pertama plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi



sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.<sup>46</sup>

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*Politei Overzee*” sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah “*politei*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.<sup>47</sup>

Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi adalah organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban

---

<sup>46</sup> Sadjijono, 2009, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, hlm. 1.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.<sup>48</sup>

Sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa polisi diartikan :

1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum;
2. Anggota dari badan tersebut diatas.

Berdasarkan pengertian diatas, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.<sup>49</sup>

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

Istilah Kepolisian dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati pengertian fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU Kepolisian tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 5.

## **2. Landasan Yuridis Kepolisian NRI**

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian NRI, serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian NRI sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Adanya kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, dimana telah dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian NRI dalam ABRI.

Sebagai akibat dari penggabungan tersebut, maka yang terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian NRI sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran sosial politik dalam Dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan Kepolisian NRI yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa,

bernegara, dan bermasyarakat. Menimbang realitas tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian memutuskan TNI dan Kepolisian NRI secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Ketika terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan TNI dan Kepolisian NRI maka kedua badan tersebut harus bekerja sama dan saling membantu.

Berdasarkan perubahan secara konstitusional, maka keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian NRI dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian NRI secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, diantaranya penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kini juga menjadi landasan yuridis normatif dari eksistensi Kepolisian NRI. Dalam asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam UU

Kepolisian NRI secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian NRI, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian NRI memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, UU Kepolisian NRI mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi Kepolisian agar tindakan pejabat Kepolisian NRI secara menyeluruh dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan hak asasi manusia (HAM).

Disamping memperhatikan HAM dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian NRI wajib pula memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPidana), ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur otonomi khusus, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian NRI.

### **3. Tugas dan Wewenang Kepolisian NRI**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.<sup>51</sup>

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib,

---

<sup>51</sup> Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, 1997, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta. hlm. 22.

dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas-tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari :

1. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;



11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup>

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.

Secara teoritik menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt<sup>53</sup> wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh tiga cara, yaitu :

1. *Atributie* atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
2. *Delegatie* atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. *Mandaat* atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang - undangan, anantara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, UU No. 8 Tahun

---

<sup>52</sup> Sadjijono, *Op.cit.*, hlm. 113.

<sup>53</sup> HR Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 104.

1981 tentang KUHAP, dan lain-lain. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur.

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No.2

Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, meliputi :

- a. Menerima laporan/pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau penyelidikan proses pidana Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002.

Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait;
- j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang di bidang proses pidana :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan surat;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>54</sup>

Wewenang Polri dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP. Sedangkan kewenangan kepolisian selaku penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP.

Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian NRI tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada polisi adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemis dan gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghapusan praktik lintah darat, dan pungutan liar.

---

<sup>54</sup> Pasal 15 Ayat 1, 2 dan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Polisi berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

#### **D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana**

Penanggulangan tindak pidana terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu<sup>55</sup> :

##### **1. *Pre-Emtif***

Yang dimaksud dengan upaya *Pre-Emtif* disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara *Pre-Emtif* adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha *pre Pre-Emtif* faktor niat menjadi

---

<sup>55</sup> A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm.79.

hilang meskipun ada kesempatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga.

## **2. *Preventif***

Upaya-upaya *preventif* ini merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya *preventif* kesempatan ditutup.<sup>56</sup>

## **3. *Represif***

Upaya ini dilakukan setelah terjadi tindak pidana/ kejahatan. Tindakan ini berwujud penegakan hukum (*law enforcement*) berupa: proses hukum yang harus dilakukan mulai dari tahap penyelidikan/ penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu tepatnya di Polsek Bajeng. Tempat penelitian tersebut dipilih oleh penulis karena maraknya kasus perjudian yang terjadi di wilayah tersebut dan dianggap bersesuaian dengan judul yang diangkat oleh penulis.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara :

1. Teknik wawancara dengan pihak yang terkait; dan
2. Studi dokumentasi, yakni menginventarisir dan mempelajari dokumen perkara yang menyangkut perjudian. Dokumen tersebut termasuk BAP Penyidikan, BAP Penuntutan dan Putusan Hakim.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :

#### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait pembahasan dalam skripsi ini.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, penulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang digolongkan sebagai berikut:

##### **a. Bahan Hukum Primer:**

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia.

##### **b. Bahan Hukum Sekunder:**

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, tulisan artikel internet atau cetak yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian.



#### **D. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dan berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa**

Kecamatan Bajeng merupakan salah satu bagian wilayah dari Kabupaten Gowa yang terletak di sebelah Utara Sungguminasa yang merupakan Ibukota Kabupaten Gowa. Dari segi geografis Kecamatan Bajeng terdiri dari dataran dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Palangga, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Takalar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontonompo, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bajeng Barat.

Kecamatan Bajeng merupakan wilayah dataran yang memiliki wilayah seluas 60,09 Km<sup>2</sup> atau 3,19% dari luas wilayah daratan Kabupaten Gowa. Kecamatan Bajeng mempunyai 14 wilayah Desa/Kelurahan yaitu Desa Tangkebajeng, Desa Panyangkalang, Desa Pabentengang, Desa Maccinibaji, Desa Bone, Desa Maradekaya, Desa Lempangang, Desa Bontosunggu, Desa Panciro, Desa Paraikatte, Kelurahan Kalebajeng, Kelurahan Limbung, Kelurahan Mataallo, dan Kelurahan Tubajeng.<sup>57</sup>

Dari segi jumlah penduduk, Kecamatan Bajeng memiliki jumlah penduduk sebesar 67.883 jiwa, dengan rincian penduduk perempuan

---

<sup>57</sup> BPS Kabupaten Gowa 2016

mencapai 34.336 jiwa dan penduduk laki-laki mencapai 33.547 jiwa. Kemudian dari segi pekerjaan, mayoritas penduduk Kecamatan Bajeng bermata pencaharian sebagai petani, sebagian lagi sebagai pedagang dan wiraswasta.<sup>58</sup>

## **B. Penyebab Maraknya Tindak Pidana Perjudian**

Dalam berbagai kasus tindak pidana perjudian di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, terjadi karena adanya faktor yang mendasarinya. Dari hasil wawancara Penulis dengan Kapolsek Bajeng, AKP Amin Juraid, ada beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana perjudian marak terjadi, yaitu :<sup>59</sup>

### **1. Faktor Dari Dalam Diri Individu (Internal)**

#### **a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum**

Pendidikan mengambil peran penting dalam merubah perilaku dan pola pemikiran seseorang akan hal-hal yang buruk. Masyarakat bersikap acuh-tak acuh terhadap hukum yang berlaku. sehingga memungkinkan kesadaran hukum mereka akan hal-hal yang buruk dalam hal ini tindak pidana perjudian masih rendah.

---

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan AKP Amin Juraid, Kapolsek Bajeng, Hari Senin, Tanggal 10 April 2017, Pukul : 10.30 Wita.

b. Mendapatkan uang dengan mudah dan cepat

Perjudian dilakukan sebagai salah satu cara cepat dan mudah dalam mendapatkan uang tanpa susah payah kerja mengeluarkan keringat terlebih dahulu. Dalam kasus ini yang banyak terjadi adalah perjudian jenis kupon putih atau toto gelap (togel).

c. Hobi/ Iseng-iseng

Seseorang yang menjadikan perjudian sebagai hobi karena dengan berjudi mereka mendapat kepuasan tersendiri. Ada juga yang melakukan perjudian hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang.

2. Faktor Dari Luar Individu (Eksternal)

a. Faktor ekonomi

Sulitnya seseorang mendapatkan nafkah menjadikan perjudian sebagai solusi jangka pendek untuk mendapatkan uang. Akan tetapi masalah yang akan ditimbulkan akan berdampak panjang kedepannya.

b. Faktor pergaulan

Apabila lingkungan tempat tinggalnya baik, maka akan baik pula manusianya. Namun sebaliknya, apabila lingkungan tempat tinggal buruk maka manusianya akan ikut terpengaruh buruk juga.

c. Faktor keluarga

Keluarga mengambil peran penting dalam pembentukan sikap, sifat dan kepribadian seseorang. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling banyak ditiru oleh anggota keluarga.

**C. Upaya - upaya yang dilakukan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian**

Hukum sebagai norma memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat. Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah. Adapun peran kepolisian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Pada bab sebelumnya, telah diuraikan upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Ada 3 (tiga) bagian pokok yaitu upaya *Pre-Emtif*, upaya *Preventif* dan upaya *Represif*. Upaya penanggulangan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua) jalur yakni:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*). Jalur ini termasuk bagian dari upaya *represif*.
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
  - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya *preventif*, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata;
  - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau tindak pidana dan pembinaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya *pre-emptif*.

Secara sederhana dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana melalui jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat *represif* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah tindak pidana terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Polsek Bajeng, Kabupaten Gowa dalam menanggulangi tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

#### 1. Upaya *Pre-Emtif*

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara *Pre-Emtif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari:

##### a. Penyampaian ke Masjid-Masjid

Kegiatan ini rutin dilakukan setelah pelaksanaan shalat berjamaah khususnya di hari jumat. Mengingat banyaknya masyarakat yang datang terutama laki-laki ke masjid sehingga tidak perlu lagi susah payah mengundang dan mengumpulkan masyarakat untuk berkumpul. Dalam kegiatan ini Kapolsek dan jajarannya menyampaikan pesan-pesan kamtibmas (keamanan dan ketertiban

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Kamaruddin, SH, Kanit Reskrim Polsek Bajeng, Hari Jumat, Tanggal 7 April 2017, Pukul: 14.15 Wita.

masyarakat) kepada jamaah antara lain terkait masalahantisipasi penyalahgunaan narkoba, balapan liar dan kenakalan remaja termasuk himbauan untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian.

b. Bhayangkara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) *Door to Door*

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan pihak kepolisian dengan menugaskan beberapa polisi untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 antara lain sebagai berikut:

Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Babinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya;
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah;
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.



c. Penyuluhan Hukum di Kantor Desa/ Rumah Tokoh Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Polsek Bajeng bekerjasama dengan Lurah/Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat setempat agar mengundang dan mengumpulkan warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh pihak Polsek Bajeng. Dalam penyuluhan hukum tersebut, Polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai tindak pidana perjudian, apa dasar hukumnya, kemudian apa saja yang diatur dan dilarang beserta sanksinya apabila aturan itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat menjadi tahu resiko yang akan diterimanya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan resiko tersebut masyarakat akan berpikir dua kali dan tidak lagi melakukan perjudian.

2. Upaya *Preventif*

Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya ini berupa patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak Polsek Bajeng di tempat-tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung maupun rumah warga yang dicurigai sebagai tempat

perjudian, sehingga masyarakat pun menjadi takut untuk melakukan perjudian.

### 3. Upaya *Represif*,

Dalam perkara tindak pidana perjudian, upaya represif atau upaya penal yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Polsek Bajeng adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP kepada pelaku-pelakunya, kemudian memeriksa mereka menurut KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai kegiatan perjudian. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota Polisi segera melakukan penyelidikan. Dari beberapa laporan yang diterima oleh Polsek Bajeng ada berupa laporan dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam dan ada juga dalam bentuk laporan lisan. Dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 103 ayat (2) KUHP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh Penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan Penyelidik.

Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian itu benar atau tidak, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di lokasi kejadian, memang benar telah terjadi tindak

pidana perjudian, maka selanjutnya Polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan perjudian itu dan kemudian mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi. Dalam hal ini pelaku perjudian tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHP adalah:

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
2. Tertangkapnya seseorang apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu segera setelah tersangka ditangkap dan barang bukti beserta saksi telah dikumpulkan, tersangka dan barang bukti yang ada kemudian diserahkan kepada penyidik guna kepentingan penyidikan.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa penyelidikan memiliki fungsi sebagai penyaring apakah terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindari sedini mungkin. Dengan demikian, penyidik memiliki peran penting, yaitu melakukan tindakan awal dalam rangka proses penyelesaian

perkara dan tindakan-tindakan selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara pidana itu bergantung pada penyelidikan yang mengawalinya.<sup>61</sup>

Menurut KUHAP dan UU Kepolisian, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan oleh Polisi tersebut kemudian dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk membuat dakwaan dan mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim.

Penyidikan yang dilakukan Polsek Bajeng dalam memeriksa perkara perjudian adalah pertama-tama dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum. Setelah itu, Polisi segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi. Setelah itu memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan kemudian membuat Berita Acara di TKP serta membuat sketsa gambar TKP. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti lalu membuat Berita

---

<sup>61</sup> Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 43.

Acara Penyitaan. Kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuatnya Berita Acara Penyitaan, dikeluarkanlah Surat Perintah Penahanan, maksimal penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah selama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum selama 40 (empat puluh) hari, apabila pemeriksaan belum selesai.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas, maka dapat diperoleh beberapa informasi, antara lain jenis permainan judi yang dilakukan oleh tersangka, lokasi yang dijadikan sebagai tempat berjudi, serta alat/benda-benda yang dipergunakan dalam berjudi yang ditemukan di TKP.

Ada beberapa macam jenis permainan judi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa antara lain judi sabung ayam, kupon putih/togel, dan judi kartu baik joker maupun domino. Jumlah taruhan dan cara bermain dari masing-masing permainan judi itu ditentukan oleh kesepakatan para pemain. Sedangkan untuk tempat bermain judi, biasanya dilakukan di warung-warung atau rumah-rumah yang agak jauh dari jalan umum akan tetapi masih dapat diketahui oleh masyarakat. Benda-benda yang biasa ditemukan oleh Polisi di TKP sebagai barang bukti adalah sejumlah uang taruhan, kartu joker/domino, ayam jantan ember dan kain untuk judi sabung ayam, alat tulis untuk judi togel/kupon putih.

Dalam melakukan penyidikan, ada kalanya penyidikan itu dihentikan karena beberapa faktor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat

(2) KUHAP, yaitu :

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;  
atau
3. Penyidikan dihentikan demi hukum, disebabkan karena:
  - a. Tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu (penyelundupan, tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana korupsi);
  - b. Kadaluwarsa penuntutannya;
  - c. Pengaduan tindak pidana dicabut kembali;
  - d. Perkara tindak pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
  - e. Penyelesaian di luar siding pengadilan.

Penghentian penyidikan tersebut selanjutnya diberitahukan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka, dan keluarganya.

Setelah berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polisi tersebut lengkap, berkas tersebut kemudian dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Menurut Pasal 138 KUHAP, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum kemudian mempelajari dan

memeriksa berkas perkara tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan kemudian wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum.

Apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap berkas perkara tersebut belum lengkap maka berkas tersebut dikembalikan lagi kepada Polisi disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dengan demikian Polisi melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi berkas tersebut. Setelah berkas perkara itu dilengkapi, kemudian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara diterima, berkas tersebut dikirim kembali ke Jaksa Penuntut Umum. Apabila setelah memeriksa kembali berkas perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum menganggap berkas tersebut telah lengkap, kemudian dikeluarkanlah P-21 oleh Jaksa Penuntut umum kepada Penyidik sebagai bentuk pemberitahuan bahwa penyidikan dianggap telah selesai. Setelah mendapat pemberitahuan tersebut, kemudian Polisi mengirim tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan. Dengan demikian, selesailah tugas Polisi dalam sistem peradilan pidana yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal menggunakan upaya penal.

Adapun wujud dari peran Polsek Bajeng dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan upaya represif atau upaya penal, dapat

dilihat dari data penanganan perkara tindak pidana perjudian di Kecamatan Bajeng pada tahun 2014 sampai 2016, sebagai berikut:

Tabel. 1. Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Perjudian Tahun 2014 - 2016 Di Polsek Bajeng

No.	Jenis Perjudian	Tahun					
		2014		2015		2016	
		Laporan	Selesai	Laporan	Selesai	Laporan	Selesai
1.	Kartu Domino	0	1	1	1	1	1
2.	Kartu Joker	1	1	1	3	0	0
3.	Sabung Ayam	1	2	1	2	1	1
4.	Kupon Putih/ Togel	0	1	1	1	0	0
Total		2	5	4	7	2	2

*Sumber : Unit Reskrim Polsek Bajeng*

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa ada 4 (empat) jenis perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bajeng, yaitu kartu domino, kartu joker, sabung ayam, dan kupon putih atau togel. Pada tahun 2014 terdapat 2 (dua) laporan, masing-masing untuk jenis perjudian kartu joker dan sabung ayam, sedangkan yang berhasil diselesaikan ada 5 (lima) kasus. Artinya dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana perjudian, Polsek Bajeng tidak menunggu datangnya laporan dari masyarakat, melainkan merupakan inisiatif Polisi untuk mencari dan menemukan kegiatan perjudian di lingkungan masyarakat. Hal ini menunjukkan kinerja Polisi di Polsek Bajeng dapat dikatakan berhasil



dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang ada di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

Selanjutnya data pada tahun 2015, terdapat peningkatan baik dari segi laporan dan penyelesaiannya. Tercatat ada 4 (empat) laporan yang diterima Polsek Bajeng, masing-masing untuk jenis perjudian kartu domino, kartu joker, sabung ayam, dan kupon putih/togel. Dari 4 (empat) laporan tersebut, yang berhasil diselesaikan oleh Polsek Bajeng, yaitu 7 (tujuh) kasus, dengan rincian 4 (empat) berasal dari laporan masyarakat dan 3 (tiga) berasal dari inisiatif Polisi untuk mencari dan menemukan kegiatan perjudian yang ada di lingkungan masyarakat.

Kemudian data pada tahun 2016, terjadi penurunan dari segi laporan dan tindak pidana perjudian yang terjadi. Tercatat dalam kurun waktu tahun 2016, hanya ada 2 (dua) laporan yang diterima oleh Polsek Bajeng masing-masing untuk jenis perjudian kartu domino dan sabung ayam. Semua laporan tersebut berhasil diselesaikan oleh Polsek Bajeng. Berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Bajeng, Aiptu Kamaruddin, SH., perjudian ditahun tersebut sangat jarang terjadi di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Hal ini berdasarkan penelusuran dan patroli anggota Unit Reskrim Polsek Bajeng memang tidak ditemukan kegiatan perjudian selain dari pada laporan dari masyarakat.

Jadi, berdasarkan tabel diatas pada tahun 2014, 2015, dan 2016, terdapat total 8 (delapan) laporan yang diterima Polsek Bajeng, sedangkan yang berhasil diselesaikan total ada 14 (empat belas) kasus, dengan rincian 8 (delapan) berasal dari laporan masyarakat dan 6 (enam) berasal dari inisiatif Polisi Polsek Bajeng untuk mencari dan menemukan kegiatan perjudian. Dengan demikian, dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang ada di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Polsek Bajeng dapat dikatakan telah berhasil melaksanakan tugasnya, karena semua laporan yang diterima oleh Polsek Bajeng berhasil diselesaikan dengan baik melalui upaya penal/represif yaitu melalui pemeriksaan perkara sesuai dengan KUHAP dan UU Kepolisian NRI.

Dari total jumlah kasus yang diselesaikan oleh Polsek Bajeng, hanya sedikit yang diteruskan sampai ke Kejaksaan dan pengadilan. Hal ini terjadi karena menurut pihak kepolisian tidak perlu sampai dilimpahkan kasus perjudian tersebut sampai ke Kejaksaan dan pengadilan karena adanya beberapa pertimbangan. Namun, pihak kepolisian tidak memberikan keterangan yang jelas terkait tidak diteruskannya perkara perjudian sampai ke Kejaksaan dan pengadilan.

Namun, untuk mengetahui persentase jumlah perkara perjudian yang diteruskan ke Kejaksaan dan pengadilan dengan perkara perjudian yang hanya sampai di Polsek Bajeng, penulis juga mengambil data di Polres

Gowa, Kejaksaan Negeri Gowa, dan Pengadilan Negeri Sungguminasa, dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2016. Adapun data perkara perjudian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 2. Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Perjudian di Polres Gowa

No.	Tahun	Laporan	Selesai
1.	2014	15	37
2.	2015	11	16
3.	2016	5	7
Total		31	60

*Sumber : Sat. Resmob Polres Gowa*

Berdasarkan tabel 2 diatas, dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, total jumlah tindak pidana perjudian ada 31 (tiga puluh satu) laporan, sedangkan yang selesai dan yang dilimpahkan ke kejaksaan ada 60 (enam puluh) perkara. Data ini merupakan laporan dari beberapa polsek yang ada di Kabupaten Gowa, termasuk dari Polsek Bajeng. Namun, jumlah laporan perkara yang ditangani Polsek Bajeng yang diteruskan ke kejaksaan belum diketahui, karena pihak dari *Reserse Mobile (Resmob)* Polres Gowa, tidak memberikan data secara rinci terkait perkara yang ditangani oleh Polsek-Polsek yang ada di Kabupaten Gowa, termasuk Polsek Bajeng, melainkan hanya memberikan jumlah total laporan dan jumlah total perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2016.

Tabel. 3. Data Perkara Perjudian pada Tahun 2014 – 2016  
di Kejaksaan Negeri Gowa

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2014	33
2.	2015	20
3.	2016	7
Total		60

*Sumber : Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Gowa*

Selanjutnya pada tabel 3 diatas adalah data perkara tindak pidana perjudian yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Gowa. Total perkara yang ditangani dalam kurun waktu 2014 sampai tahun 2016, ada 60 (enam puluh) perkara. Dengan rincian pada tahun 2014 ada 33 (tiga puluh tiga) perkara, tahun 2015 ada 20 (dua puluh) perkara, dan pada tahun 2016 ada 7 (tujuh) perkara. Jumlah total perkara perjudian tersebut sama dengan jumlah yang ditangani oleh Polres yaitu 60 (enam puluh) perkara, akan tetapi terdapat perbedaan jumlah perkara pada tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2014 Polres Gowa menangani 37 (tiga puluh tujuh) perkara perjudian sedangkan yang ditangani Kejaksaan Negeri Gowa hanya 33 (tiga puluh tiga) perkara saja. Artinya ada 4 (empat) perkara perjudian yang tidak dilimpahkan pada tahun 2014 melainkan baru dilimpahkan pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena penanganan perkara perjudian di Polres Gowa terjadi pada akhir tahun, sehingga baru akan dilimpahkan ke kejaksaan pada awal tahun. Begitupun pada tahun 2015 perkara yang

ditangani Polres Gowa ada 16 (enam belas) perkara, akan tetapi ada 4 (empat) perkara tahun sebelumnya yg belum dilimpahkan sehingga total yang ditangani Kejaksaan Negeri Gowa pada tahun 2015 ada 20 (dua puluh) perkara perjudian.

Tabel. 4. Data Perkara Perjudian Pada Tahun 2014 – 2016  
di Pengadilan Negeri Sungguminasa

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2014	29
2.	2015	22
3.	2016	9
Total		60

*Sumber : Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa*

Kemudian pada tabel 4 diatas, merupakan data perkara perjudian yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa, Gowa. Total perkara dalam kurun waktu 2014 sampai 2016, ada 60 (enam puluh) perkara.. Jumlah total perkara tersebut sama dengan jumlah total yang ditangani oleh Polres Gowa dan Kejari Gowa, Akan tetapi ada perbedaan jumlah penanganan perkara setiap tahunnya. Pada tahun 2014. Kejari Gowa menangani 33 (tiga puluh tiga) perkara sedangkan Pengadilan Negeri Sungguminasa menangani 29 (dua puluh sembilan) perkara, pada tahun 2015 Kejari Gowa menangani 20 (dua puluh) perkara sedangkan Pengadilan Negeri Sungguminasa menangani 22 (dua puluh dua) perkara, dan pada tahun 2016 Kejari Gowa menangani 7 (tujuh) perkara sedangkan

Pengadilan Negeri sungguminasa menangani 9 (sembilan) perkara. Perbedaan ini disebabkan penanganan perkara di kejari Gowa terjadi pada akhir tahun sehingga pelimpahan perkaranya baru dilakukan pada awal tahun.

Dari data pada tabel 4 inilah dapat diketahui persentase pelimpahan perkara ke Kejaksaan dan Pengadilan yang dilakukan oleh Polsek Bajeng . Hal ini berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang memuat kronologi perkara di dakwaan, sehingga dapat diketahui perkara tersebut berasal dari wilayah hukum mana saja. Adapun perkara perjudian yang berasal dan ditangani oleh Polsek Bajeng adalah sebagai berikut :

Tabel. 5. Data Perkara Perjudian yang dilimpahkan oleh Polsek Bajeng ke Pengadilan Negeri Sungguminasa

No.	No. Register Perkara	Jenis Perjudian	Tahun Penanganan di Polsek
1.	34/Pid.B/2015/PN.Sgm	Kupon Putih	2014
2.	173/Pid.B/2015/PN.Sgm	Sabung Ayam	2015
3.	174/Pid.B/2015/PN.Sgm	Sabung Ayam	2015
4.	195/Pid.B/2015/PN.Sgm	Kartu Joker	2015
5.	196/Pid.B/2015/PN.Sgm	Kartu Domino	2015
6.	204/Pid.B/2015/PN.Sgm	Kartu Joker	2015
7.	229/Pid.B/2015/PN.Sgm	Kartu Joker	2015

Berdasarkan tabel 5 diatas, dapat dilihat bahwa ada 7 (tujuh) perkara perjudian yang dilimpahkan oleh Polsek Bajeng ke Kejaksaan Negeri Gowa, kemudian dilimpahkan lagi ke Pengadilan Negeri Sungguminasa. Jumlah ini tidak sesuai dengan perkara perjudian yang berhasil diselesaikan oleh Polsek Bajeng. Pada tabel 1 sebelumnya telah diketahui bahwa total ada 14 (empat belas) perkara perjudian yang berhasil diselesaikan oleh Polsek Bajeng dalam kurun waktu tahun 2014 sampai 2016, akan tetapi yang dilimpahkan hanya 7 (tujuh) perkara saja. Artinya ada 7 (tujuh) atau 50 % perkara perjudian yang tidak dilimpahkan atau dengan kata lain, penanganan perkaranya hanya sampai di Polsek saja. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari Polsek Bajeng kurang maksimal dalam hal melakukan pelimpahan perkara perjudian ke Kejaksaan dan Pengadilan. Dengan kurang maksimalnya kinerja aparat kepolisian Polsek Bajeng, maka diharapkan menjadi suatu intropeksi di internal Polsek Bajeng kedepannya.

Namun disisi lain, kinerja kepolisian Polsek Bajeng telah menunjukkan keberhasilan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dalam kurung waktu 2014 sampai 2016, terbukti semua laporan yang diterima dapat dituntaskan 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perjudian berhasil ditekan sampai seminimal mungkin oleh Polsek Bajeng. Keberhasilan tersebut tidak hanya bersumber dari keseriusan Polsek Bajeng dalam

menjalankan kebijakan kriminal untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian, tetapi juga adanya partisipasi dari masyarakat. Dengan dapat ditanggulangnya tindak pidana perjudian tersebut, maka diharapkan keamanan dan ketertiban sosial dapat terwujud di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

**D. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian**

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan situasi yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat merasa tentram, aman dan damai. Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan situasi ini. Situasi yang aman bagi masyarakat dapat meningkatkan motivasi dan semangat hidup masyarakat, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang menimpa. Namun, untuk mencapai dan mewujudkan situasi yang tentram, aman, dan damai ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi ini tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib, termasuk upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.



Namun, dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian khususnya Polsek Bajeng, Kabupaten Gowa. Dari wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Bajeng, Aiptu Kamaruddin, SH kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tertutup memberikan informasi

Maksud dari masyarakat tertutup memberikan informasi yaitu ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana perjudian. Dari keterangan beberapa warga, mereka tidak melaporkan adanya perjudian karena adanya tekanan sosiologis, mereka takut dibenci oleh pelaku perjudian maupun keluarga dari pelaku dan juga karena hubungan yang dekat antar sesama warga desa sehingga untuk pelaporan kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat.<sup>62</sup>

2. Adanya *pembackingan* dari oknum-oknum tertentu

Perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat haruslah ditangani dengan serius. Polisi sebagai kekuatan utama dalam pembinaan kamtibmas telah melakukan berbagai cara untuk

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Kamaruddin, SH, Kanit Reskrim Polsek Bajeng, Hari Jumat, Tanggal 7 April 2017, Pukul: 14.30 WITA

menanggulangi dan memberantas perjudian ini. Namun, keberhasilan dalam memberantas perjudian ini akan sia-sia apabila ada *pembacking* dari oknum-oknum tertentu dengan menggunakan dan menyalahgunakan kewenangannya. Adanya *pembacking* terhadap pelaku perjudian bukanlah hal yang baru dewasa ini, Polsek Bajeng maupun Polres Gowa selalu saja menemukan oknum-oknum *pembacking* dalam setiap operasi mereka. Jika hal ini terjadi tidak jarang ada oknum yang berusaha untuk berdamai dengan petugas kepolisian dengan menawarkan sejumlah uang tunai, dan ada pula yang berusaha melawan karena merasa selama ini tidak terjangkau dengan hukum. Ulah para *pembacking* ini sangat tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak demi tegaknya hukum dan terciptanya rasa aman dan tentram di masyarakat.<sup>63</sup>

Para *pembacking* kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri. Bukan hanya sekedar pembantu kejahatan. Dalam kasus perjudian, maka *pembacking* dapat dipersamakan dengan para bandar judi, yang didalam KUHP diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Acuan ini berasal dari pernyataan pakar hukum Indonesia, Moeljatno<sup>64</sup>, yang menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan perbuatan penyelesaian, tetapi

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Kamaruddin, SH, Kanit Reskrim Polsek Bajeng, Hari Jumat, Tanggal 7 April 2017, Pukul : 14.40 Wita.

<sup>64</sup> Anton Tabah, *Op.cit.*, hlm. 250.

apabila kerjasama dengan pelaku perbuatan tersebut erat sekali, maka perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai pembantu tindak pidana.

Untuk mengatasi masalah *pembacking* ini, maka baik Kapolri maupun panglima TNI hendaknya dapat memberikan ultimatum yang tegas bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk *pembacking* kejahatan, termasuk perjudian, sehinggadengan demikian Polisi sebagai aparat penegak hukum dan kekuatan utama pembinaan kamtibmas tidak lagi menemui hambatan dalam mencegah dan menanggulangi praktik perjudian di masyarakat.

### 3. Pelaku melarikan diri

Maksud dari pelaku melarikan diri yaitu ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Hal ini disebabkan adanya yang membocorkan atau memberitahu para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri. Akan tetapi, tindakan polisi tidak sampai disitu, polisi akan terus melakukan pengejaran sampai para pelaku ini tertangkap.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Kamaruddin, SH, Kanit Reskrim Polsek Bajeng, Hari Jumat, Tanggal 7 April 2017, Pukul : 14.55 Wita.

## **E. Kasus dan Analisis Kasus**

### **1. Kasus Posisi**

Berawal pada hari selasa tanggal 9 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Tamalalang Desa Lempangan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa sering terjadi permainan judi jenis kartu joker. Berdasarkan informasi tersebut aparat Kepolisian dari Polsek Bajeng menuju tempat yang dimaksud dan setiba di lokasi terdakwa Syamsuddin Dg Sarro Bin Mangngu Dg Ngitung dan teman-temannya ditemukan sedang bermain judi jenis kartu joker. Terdakwa bersama-sama Sitakka alias Ita, Dg Tutu dan satu orang yang terdakwa tidak ketahui namanya (dalam daftar pencarian Orang/DPO) melakukan permainan judi di sebuah balai-balai di pemukiman warga tanpa mendapat persetujuan atau izin dari pihak yang berwenang sepakat mengadakan permainan judi dengan menggunakan kartu joker serta menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan cara pertama-tama kartu joker dikocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain, dan tiap pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sedangkan yang membagi kartu mendapat 14 (empat belas) lembar. Selanjutnya permainan dimulai dan apabila ada pemain yang menang maka pemain yang kalah harus membayar uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) untuk menang biasa sedangkan jika menang memiliki dua lembar kartu joker yang

berwarna sama (hitam-hitam/ merah-merah) maka yang kalah diharuskan membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

## **2. Dakwaan dan Tuntutan**

Jaksa Penuntut Umum mengajukan Syamsuddin Dg Sarro Bin Mangngu Dg Ngitung sebagai terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2015, bertempat di Tamalalang Desa Lempangan Kec. Bajeng Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum.

Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan mendakwa Syamsuddin Dg Sarro Bin Mangngu Dg Ngitung melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidair.

Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri :

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Dg Sarro Bin Mangngu Dg Ngitung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana

berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana pada dakwaan primair kami;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Dg Sarro Bin Mangngu Dg Ngitung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana pada dakwaan Subsidair kami;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Syamsuddin Dg Sarro Bin Mangngu Dg Ngitung selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti perkara ini berupa :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - dan
  - 94 (sembilan puluh empat) lembar kartu Joker;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

### **3. Pengadilan Negeri**

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusan perkara ini mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa unsur barangsiapa dapat dilihat bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah dewasa dan mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik selama proses persidangan. Bahwa unsur tanpa mendapat izin dapat dilihat bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada persetujuan atau izin dari pihak yang berwenang. Bahwa unsur dengan sengaja menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan judi, dapat dilihat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bersama teman-temannya tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu joker dan menggunakan uang sebagai taruhannya. Jadi berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum, oleh karena Terdakwa hanya sekedar ikut memasang taruhan saja. Bahwa dengan adanya salah satu unsur tindak pidana yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melanggar pasal yang

didakwakan dalam dakwaan primair dan karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Bahwa unsur barangsiapa dan unsur tanpa mendapat izin telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dianggap telah terpenuhi menurut hukum. Kemudian unsur turut serta bermain judi bahwa permainan judi mengandung unsur a) adanya pengharapan untuk menang, b) bersifat untung-untungan saja, c) ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, d) pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, terbukti terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidairnya dan oleh karena itu terdakwa haruslah dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terdakwa harus dijatuhi pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa berlaku sopan, menagkui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah Majelis Hakim mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Dg Sarro Bin Mangngu Dg Ngitung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Syamsuddin Dg Sarro Bin Mangngu Dg Ngitung dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Dg Sarro Bin Mangngu Dg Ngitung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (bulan);
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 94 (sembilan empat) lembar kartu Joker;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah).

#### **4. Analisis Kasus**

Berdasarkan kasus yang penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan No. 229/Pid.B/2015/PN.Sgm, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang

berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang rumusan pasalnya sebagai berikut :

#### Pasal 303 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

Ke-2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut antara lain adalah :

a. Unsur barangsiapa

Perkataan “Barangsiapa” dalam pasal ini menunjukkan pelakunya (subjek) atau orang yang melakukan tindak pidana yaitu Syamsuddin Dg Sarro Bin Mangngu Dg Ngitung;

b. Unsur tanpa mendapat izin

Tanpa mendapat izin dalam hal ini yaitu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perjudian tanpa hak atau tanpa mendapat izin dari pemerintah yang berwenang;

c. Unsur turut serta bermain judi

Yaitu bahwa terdakwa dengan sengaja turut serta dalam permainan judi menggunakan kartu joker yang diadakan oleh teman-temannya dengan sejumlah uang sebagai taruhannya.

Dalam fakta persidangan, semua unsur-unsur tersebut telah dibuktikan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga Terdakwa Syamsuddin Dg Sarro Bin Mangngu Dg Ngitung terbukti telah melakukan tindak pidana turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Dalam perkara ini, dapat dilihat adanya peran Polsek Bajeng yaitu dalam melakukan penyelidikan di TKP, kemudian menangkap tersangka lalu membawanya beserta barang bukti ke Polsek Bajeng guna kepentingan penyidikan. Setelah berkas perkara lengkap, kemudian berkas perkara diserahkan ke Kejaksaan Negeri Gowa guna kepentingan penuntutan, dan dari Kejaksaan, pemeriksaan perkara pun dilanjutkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan, penulis sangat tidak setuju. Mengingat ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun, maka menurut penulis vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa Syamsuddin Dg Sarro Bin Mangngu Dg Ngitung tersebut terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi terdakwa. Seharusnya terdakwa divonis lebih berat karena dengan vonis yang lebih berat, diharapkan terdakwa sadar akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari dan masyarakat yang menghadiri persidangan tersebut menjadi takut untuk melakukan perjudian. Dengan demikian, perkara perjudian di Kabupaten Gowa, khususnya di Kecamatan Bajeng akan semakin berkurang sehingga keamanan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dapat terwujud.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Bajeng dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di masjid-masjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) *Door to Door*, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian secara bersama-sama dengan pihak Kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana;
2. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya *pembackingan* dari oknum-oknum tertentu dan pelaku melarikan diri.

## **B. Saran**

1. Kepolisian hendaknya lebih transparan lagi terkait pelimpahan perkara perjudian ke Kejaksaan, karena jumlah perkara yang ditangani dan dilimpahkan itu berbeda. Disini perlu adanya keterbukaan mengapa beberapa perkara tidak sampai diteruskan ke Kejaksaan. Jika hal ini terus dibiarkan maka pelaku yang perkaranya tidak sampai diteruskan ke Kejaksaan maupun masyarakat yang mengetahui hal tersebut menjadi tidak takut lagi akan sanksi dari perjudian. Sebaliknya jika Kepolisian tegas dan berani dalam melimpahkan seluruh perkara yang ditanganinya sesuai proses hukum yang berlaku maka pelaku dan masyarakat pada umumnya terdorong untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian;
2. Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian, tidak hanya dengan mengandalkan peran Kepolisian, tetapi juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Masyarakat hendaknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada Kepolisian terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggalnya, sehingga Kepolisian dapat segera bertindak guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian demi terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, damai dan tentram.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Adami Charzawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Anton Tabah. 1991. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

A.S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books: Makassar.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Djoko Prakoso. 1987. *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. PT Bina Aksara: Jakarta.

Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi; Edisi Kedua*. Sinar Grafika: Jakarta.

Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. PT. Rafika Aditama: Bandung.

H.R Ridwan. 2009. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers: Jakarta.

Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan: Jakarta.

Ismu Gunadi. Jonaidi Efendi. dan Fifit Fitri Lutfianingsih. 2015. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana PrenadaMedia Group: Jakarta.

Komariah E. Sapardjaja. 2002. *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Alumni: Bandung.

Ledeng Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.



- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.
- Sadjijono. 2009. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang: Surabaya.
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam. 1997. *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*. Dinas Hukum Polri: Jakarta.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia –Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press: Malang.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Refika Aditama: Bandung.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

**Internet :**

<https://oursite116e11.wordpress.com/pengertian-gambling-online-gambling-serta-sejarahny/>. diakses 23 Februari 2017 Pukul 23.00 Wita.

Johanes Papu. Perilaku Berjudi. <http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial.asp>. diakses pada 26 Februari 2017 Pukul 22.15 Wita.